



Jangan Lamban Soal Pengadaan Lahan Makam

YOGYA, TRIBUN - Kalangan legislatif mendorong pengadaan tanah untuk pemakaman di Kota Yogyakarta bisa dilaksanakan secepatnya. DPRD Kota Yogyakarta menilai pembelian tanah makam di luar daerah ini bisa sangat membantu rakyat di tengah biaya bedah bumi yang sangat mahal.

"Tanah untuk makam ini bisa dibeli di Bantul, atau Kulonprogo. Pembelian tanah makam ini sangat membantu rakyat," ujar anggota Komisi D DPRD Kota Yogyakarta, Antonius Fokki Ardiyanto, Senin (1/5).

Dia menilai Pemerintah Kota (Pemkot) lamban dalam merealisasikan pengadaan tanah makam tersebut. Fokki menjelaskan, usulan untuk membeli tanah di luar Kota Yogyakarta untuk makam ini sudah dilakukan oleh Komisi D sejak dua tahun lalu.

Bahkan, hasil kajian juga sudah dilakukan dan sangat mungkin bisa dilaksanakan. "Kami juga sudah rapat dengan Bappeda sejak dua tahun lalu, hingga sekarang belum terealisasi," jelasnya.

Dia menyebutkan, pembelian tanah makam ini tinggal menunggu kemauan politik dari wali kota saja. Pasalnya, seluruh anggota dewan sudah menyepakati pengadaan lahan makam ini. Apalagi, kata dia, keuangan

di daerah sangat memungkinkan dan didukung juga oleh aturan.

"Tinggal kemauan politik saja dari wali kota. Sekarang pertanyaannya, mau tidak pemerintah berpihak kepada kepentingan rakyat," ujar politikus PDI Perjuangan ini.

Sejumlah alasan yang saat ini banyak dijumpai, karena dampak sosial dan warga sekitar tidak mau karena tanah untuk lokasi pemakaman, menurut Fokki terlalu mengada-ada. Hal ini lantaran untuk tempat pemakaman umum (TPU) pasti akan ditempatkan di lokasi yang jauh dari pemukiman.

"Kajian pun sebenarnya sudah ada dari Pemerintah DIY. Dan hasil kajian jelas bisa membeli tanah. Bappeda pun juga sudah punya," jelasnya.

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta, hingga kini masih terus mengkaji persoalan pengadaan lahan makam. Selain itu, dinas terkait juga akan melakukan penelusuran terkait dengan hak atas tanah makam di masyarakat. Sehingga, untuk tahun ini, rencana pengadaan lahan di luar wilayah Kota Yogyakarta untuk mengatasi penuhnya lahan makam belum dapat terealisasi.

Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ru-

ang, Hari Setya Wacana menjelaskan, pihaknya melakukan penelusuran makam yang ada di masyarakat. Penelusuran ini untuk mengetahui hak atas tanah makam tersebut milik siapa.

Berdasarkan data dari dinas terkait, saat ini terdapat sekitar 190 lahan pemakaman yang ada di Kota Yogyakarta. Terdapat empat makam milik pemerintah kota (Pemkot) Yogyakarta yang dikelola melalui kecamatan yakni, Makam Pracimoloyo Pakuncen di Wirobrajan, Makam Sasonoloyo di Mergangsan, Makam Sariloyo di Mantrijeron dan Makam Utaraloyo Tegalrejo. Sementara, untuk 115 makam di antaranya, berdiri di tanah negara dan dikelola masyarakat.

Di satu sisi, pengadaan lahan makam untuk pun terancam tak terealisasi tahun ini. Pihak dinas terkait sejauh ini masih melakukan kajian terkait rencana pengadaan lahan makam di wilayah luar Kota Yogyakarta.

Dia menambahkan, rencana pengadaan lahan makam di luar wilayah Kota Yogyakarta harus memperhatikan jarak, akses, dan keluasan lahan. Hal ini mengingat warga yang difasilitasi untuk pemakaman itu adalah warga Kota Yogyakarta, tapi lokasinya di luar kota. (als)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pertanahan dan Tata Ruan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 17 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005